

ABSTRAKSI

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun disatu sisi pajak merupakan suatu beban yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dan dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan, dengan kemungkinan-kemungkinan sanksi denda dan bunga bahkan pidana yang dapat diancam dengan pidana kurungan atau penjara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Badan pada PT. "XYZ". PT. "XYZ" telah memenuhi segala kewajibannya terkait dengan kewajiban dalam hal Pajak Penghasilan Badan, namun dalam prakteknya PT. "XYZ" dapat dikatakan belum membebaskan biaya-biaya yang dikeluarkannya secara optimal untuk keperluan perpajakan. Sebuah perencanaan pajak yang baik akan dapat bermanfaat bagi PT. "XYZ" untuk mengefisienkan Pajak Terutangnya, sehingga diharapkan PT. "XYZ" dapat memperoleh laba setelah pajak yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa PT. "XYZ" memiliki masalah terkait dengan administrasi segala macam bukti nominatif yang diperlukan dalam perpajakan. Hal ini dapat menjadi evaluasi bagi PT. "XYZ" untuk meningkatkan administrasinya terkait dengan bukti nominatif. Selain itu, beberapa perubahan diperlukan dalam hal pembebanan biaya agar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan untuk dapat digunakan sebagai pengurang dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak. Sebuah penghematan pajak dapat diperoleh melalui perencanaan pajak yang akan bermanfaat bagi PT. "XYZ".

Kata-Kata Kunci: perencanaan pajak, biaya, optimal, administrasi